

## Harmoni dalam bhinneka tunggal ika: Pancasila sebagai pilar persatuan umat beragama dan masyarakat multikultural

Nur Afifah Najma<sup>1</sup>, Farah Dzakiyah<sup>2</sup>, Halawatun Nafazah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [\\*240301110003@student.uin-malang.ac.id](mailto:*240301110003@student.uin-malang.ac.id)

### Kata Kunci:

Pancasila; agama;  
masyarakat; multikultural;  
nilai

### Keywords:

Pancasila; religion; society;  
multicultural; value

### ABSTRAK

Pentingnya menjaga kerukunan dalam suatu wilayah apalagi dalam lingkup negara adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama, dan antar golongan sehingga menjadi suatu keunikan tersendiri. Di sinilah Pancasila hadir sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dan untuk menjadi perekat di antara perbedaan yang terdapat di Indonesia. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur yang

menghasilkan penemuan keindahan keselarasan antara Pancasila dan nilai-nilai agama, terutama dalam lingkungan umat beragama dan masyarakat yang multikultural. Dari sila pertama yaitu 'Ketuhanan Yang Maha Esa' telah menunjukkan bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan spiritual dalam kehidupan bernegara, walaupun tetap memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk menganut dan mempraktikkan agama mereka masing-masing. Pancasila telah membuktikan bahwa segala nilai yang tersimpan di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama. Pancasila dan agama memanglah dua hal yang berbeda namun tidak saling bertentangan. Di sini kami akan membahas satu contoh konflik sebagai sebuah tantangan yang terjadi di Tanah Air dan bagaimana pada akhirnya nilai-nilai tersebutlah yang akan menjaga harmoni Bhinneka Tunggal Ika.

### ABSTRACT

The importance of maintaining harmony in an area, especially within the scope of the state, is an obligation that the people of Indonesia must carry out. Moreover, Indonesia consists of various tribes, races, religions, and intergroups that are unique. This is where Pancasila is present as a guideline for the life of the state and nation and becomes a glue between the differences that exist in Indonesia. This article was compiled using a qualitative research method of literature study that discovered the beauty of harmony between Pancasila and religious values, especially in the environment of religious people and multicultural society. The first precept, 'Belief in One God', shows that Indonesia recognizes God as the spiritual foundation of state life. However, it still provides freedom for every citizen to embrace and practice their respective religions. Pancasila has proven that all the values contained in it follow the values in religious teachings. Pancasila and religion are two different things but do not contradict each other. Here we will discuss an example of conflict as a challenge that occurs in the country and how in the end it is these values that will maintain the harmony of Bhinneka Tunggal Ika.

## Pendahuluan

Keberagaman Indonesia dalam hal suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat menjadikannya salah satu negara multikultural terbesar di dunia. "Untuk masyarakat Indonesia, keberagaman dianggap sebagai suatu takdir yang diberikan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang diminta, dan harus diterima, bukan ditawarkan" (Saifuddin, 2019). Dari keberagaman tersebut, akan muncul keindahan seperti pelangi, yang hanya dapat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

terlihat menawan dengan variasi warna, tanpa satu warna pun keindahan itu tidak akan terlihat. Demikian juga Indonesia yang dengan keragamannya menciptakan sesuatu yang lebih mempesona. Dengan banyaknya keberagaman, untuk menjaga harmoni, kerukunan, ketenteraman, dan kedamaian, ada yang disebut alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Pancasila dasar filosofi Indonesia.
- 2) Bhinneka Tunggal Ika motto Indonesia.
- 3) UUD 1945 fondasi konstitusi Indonesia.
- 4) Burung Garuda simbol Indonesia
- 5) Bendera Merah Putih bendera Indonesia.

Pancasila adalah prinsip utama dari negara Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia. Karena Pancasila merupakan landasan filosofis negara Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan landasan filosofis negara, yang berfungsi sebagai pembela bangsa dan negara Indonesia, lambang persatuan dan kesatuan, serta pemersatu masyarakat Indonesia (Nasrullah et al., 2024). Bhinneka Tunggal Ika berarti “meskipun berbeda tetap satu” adalah semboyan Indonesia. Keberagaman di Indonesia dapat disatukan melalui Pancasila dan diungkapkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan harapan bahwa keberagaman yang ada tidak akan memecah NKRI, melainkan saling menghormati, menghargai, dan berusaha untuk toleransi demi mencapai tujuan yang sama.

UUD 1945 atau sering disebut UUD 45 juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa. UUD 45 berfungsi sebagai dasar konstitusi negara Indonesia. Segala aturan hukum yang ada di Indonesia bersumber dari UUD 45, dan setiap persoalan hukum dan negara pasti mengacu pada UUD 45. Oleh karena itu, UUD 45 memiliki posisi yang sangat tinggi dalam sistem pemerintahan negara ini. Setiap bangsa memiliki lambang negara yang melambangkan karakter, kemerdekaan, dan keagungannya. Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia, terdiri dari sejumlah lambang yang mewakili setiap sila, yang masing-masing memiliki makna dan tujuan yang tersurat maupun tersirat. Meskipun setiap komponen lambang ini unik, semuanya membentuk satu kesatuan yaitu Garuda Pancasila. Selain itu, bendera Negara Indonesia yang berwarna merah putih merupakan simbol terakhir untuk pemersatu bangsa. Bendera merah menunjukkan keberanian dan perjuangan, sedangkan bendera putih menunjukkan kemurnian dan keikhlasan. Oleh karena itu, ketika keduanya digabungkan, artinya adalah berjuang untuk negara hingga titik darah penghabisan dengan tulus.

Metode pendekatan kuantitatif dengan melakukan studi literatur digunakan dalam menyusun artikel ini. Dimulai dengan mengumpulkan berbagai buku dan jurnal referensi secara online untuk dianalisis satu persatu kemudian kami tarik benang merahnya. Penentuan topik berdasarkan tema yang telah diberikan dilakukan pertama kali dengan dilanjut oleh beberapa poin pembahasan hingga tersusunlah artikel pertama kami ini.

## Pembahasan

Peran utama Pancasila di Indonesia adalah sebagai dasar negara, artinya Pancasila merupakan ide pokok yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa yang mencakup nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki kedudukan legal formal sebab dicantumkan dalam hukum negara, khususnya pada pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-4 (Sugiarto, 2021).

Suatu paham yang disusun secara sistematis dan dianggap benar untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari disebut ideologi. Dengan demikian, sebagai ideologi negara, Pancasila adalah cita-cita bersama rakyat Indonesia dalam pembangunan nasional, khususnya mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasar Pancasila, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, merdeka, dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dinamis, dan dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pancasila sebagai (Ronto, 2012).

Frasa "multikulturalisme" berakar dari kata "budaya". Meskipun terdapat banyak definisi budaya yang berbeda di antara para ahli, dalam konteks ini, budaya dipahami berdasarkan perannya sebagai pedoman hidup manusia. Menurut salah satu sudut pandang, multikulturalisme merupakan gagasan yang dapat digunakan sebagai alat atau cara untuk mengangkat derajat manusia. Perbedaan individu dan budaya dalam hal kesetaraan diakui dan didukung oleh multikulturalisme. Menurut multikulturalisme, semua anggota masyarakat mempunyai budaya yang sama, seperti mosaik. Semua budaya kelompok yang lebih kecil yang bergabung untuk menghasilkan masyarakat yang lebih besar dengan budaya yang berbentuk layaknya mosaik. Secara luas diterima bahwa multikulturalisme adalah budaya yang didasarkan pada sejumlah konsep. "Multi" artinya banyak, "budaya" artinya budaya, dan "isme" artinya pemahaman atau aliran pemikiran tertentu (Khairuddin, 2018).

Multikulturalisme tertanam dalam berbagai interaksi yang terjadi dalam banyak struktur aktivitas manusia, seperti kehidupan sosial, bisnis, ekonomi, serta kehidupan politik dan aktivitas masyarakat lainnya. Beragam penafsiran tentang multikulturalisme muncul dari hubungan ini. Selain itu, perbedaan ini memengaruhi cara orang berperilaku dan berpikir saat berinteraksi dengan masyarakat yang heterogen. Multikulturalisme tidak dapat ditentang sebagai ideologi karena sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia, demokrasi, dan kesejahteraan warga negaranya (Ibrahim, 2013).

Rahmatullah berpendapat bahwa istilah Arab untuk multikulturalisme adalah *tasamuh*, yang berarti sikap toleransi dan menerima keberagaman orang lain. Rasa senasib sepenanggungan, rasa kebangsaan atau nasionalisme, cinta persatuan dan

kesatuan, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tidak merendahkan adat istiadat, kebangsaan, dan budaya milik orang lain merupakan empat pengertian multikulturalisme pada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (Iryani & Suriatie, 2021).

Dengan mengusung gagasan gotong royong, Soekarno turut andil dalam berdirinya negara Indonesia yang majemuk. Mengenali seluruh sisi Indonesia dimungkinkan oleh gagasan gotong royong. Asas gotong royong merupakan dasar dari pluralisme. Selain itu, asas gotong royong menjamin bahwa semua elemen saat ini ditangani secara setara dan menguntungkan Indonesia. Oleh karena itu, menjadikan gagasan gotong royong sebagai dasar dapat diterima di Indonesia, negara yang majemuk dalam banyak hal. Sebab tujuan gotong royong pula menjadi katalisator bagi tumbuhnya semangat multikulturalisme yang menghargai keberagaman demi kemajuan bersama. Menurut "Indonesia untuk Semua" yang dicetuskan oleh Soekarno, semua orang Indonesia memiliki rasa memiliki dan bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang satu (Asmuri, 2017).

Mpu Tantular pertama kali menggunakan istilah *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kitab *Sutasoma*. Hal ini memperlihatkan bagaimana Pancasila sudah menjadi representasi subjektif masyarakat sejak jaman dulu. Dalam hal pertikaian agama, Pancasila didasarkan pada gagasan "gotong royong" dan bukan Islam, Buddha, Hindu, atau Kristen. Antara golongan nasionalis pimpinan Soekarno dan golongan Islam pimpinan Muhammad Natsir yang menginginkan negara Islam sebagai dasar negara, telah terjadi pertentangan pendapat mengenai dasar negara yang akan dijadikan dasar negara sejak tahun 1938 hingga Republik Indonesia bersiap untuk merdeka. Pertentangan pendapat di antara Soekarno dan Natsir mengenai agama dan negara bermula dari sebuah tulisan Soekarno yang berjudul "Mengapa Turki Memisahkan Agama dan Negara" di tahun 1940 (Suhelmi, 2002). Golongan nasionalis menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan golongan Islam menginginkan Islam. Menurut Soekarno, agama dan negara harus dipisahkan karena agama merupakan urusan rohani sedangkan negara merupakan urusan materi.

"Ketuhanan yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya" merupakan sila pertama yang diperluas tujuh kata di tanggal 22 Juni 1945, setelah adanya kesepakatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, sila pertama diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan tujuan untuk meningkatkan persatuan nasional, mengurangi ketegangan politik yang tinggi, dan meningkatkan harapan umat Islam untuk memenangkan pemilihan umum enam bulan kemudian. Muhammad Hatta melobi agar rumusan Pancasila diubah dengan mempertimbangkan tiga faktor (Thaba, 1996).

Konsep yang dikemukakan oleh Soekarno dan Natsir menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mencolok, mulai dari rumitnya falsafah dasar negara hingga pembahasan yang panjang di atas. Analisis sejarah mendukung pernyataan Soekarno bahwa agama dan negara harus dipisahkan karena keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Menurut Muhammad Natsir, negara dan agama harus bekerja sama karena Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan pengelolaan negara. Meskipun keduanya memiliki argumen yang kuat, jelas bahwa tidak

ada pergeseran atau konflik yang mengarah pada disintegrasi dalam menentukan ideologi negara (Fathani & Qodir, 2020). Kedua tokoh nasional ini memiliki perbedaan pendapat yang kuat yang dapat memberi kita pelajaran berharga tentang kehidupan sosial. Umat Islam secara keseluruhan menganut Pancasila sebagai filsafat resmi setelah diputuskan menjadi ideologi dasar negara.

Mengenai agama dan Pancasila, sebagaimana dibahas di atas, agama dan Pancasila adalah dua entitas yang terpisah. Tapi, dua hal itu saling terkait dan harus bekerja sama. Alasannya adalah bahwa agama berfungsi sebagai pedoman keyakinan yang ditemukan dalam teks-teks suci, sementara Pancasila adalah dasar negara yang menguraikan prinsip-prinsip kehidupan bernegara sebagaimana diakui dalam kerangka konstitusional. Secara sederhana, agama merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Tuhan, sedangkan Pancasila merupakan pedoman yang dibuat oleh manusia. Jadi, meskipun agama dan Pancasila berbeda, namun ada nilai dan prinsip yang sama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ajaran tentang kemanusiaan universal sebagai ciptaan Tuhan.

Jadi Pancasila itu bukan syariat, tetapi nilai-nilainya selaras dengan syariat. Dalam hal ini, kita dapat menemukan contoh atau bukti bahwa Pancasila dan agama hidup berdampingan secara harmonis dan saling terkait, misalnya sila pertama yang menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila ini mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan agama, sebagaimana tercantum dalam UUD pasal 28E yang bunyinya: “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing” dan pasal 29 ayat (2) UUD yang menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh sebab itu, sila pertama tersebut memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan pada agama, seperti pemerintah yang memberikan kebebasan beragama kepada warga negaranya, sehingga masyarakat di negeri ini dapat beribadah dengan aman dan penuh rasa hormat sesuai dengan kepercayaannya. Di sisi lain, menurut Bapak Riswadi, M.Pd. (Dosen Fakultas Ilmu Komputer UINSI Samarinda), dalam situsny terdapat beberapa istilah yang menghubungkan Pancasila dengan agama dan masyarakat, yaitu:

- a) Pancasila sebagai Landasan Agama, Sifat pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa", tidak terbatas pada satu agama saja, tetapi mendorong penerimaan dan penghormatan terhadap berbagai kepercayaan. Oleh karena itu, Pancasila dalam kaitannya dengan agama berarti menerima keberagaman dan mengakui bahwa memeluk agama masing-masing adalah hak asasi yang harus dihormati.
- b) Pancasila sebagai Jembatan Agama, Jembatan adalah penghubung, dan ketika terdapat perbedaan yang memiliki tujuan yang sama, diperlukan jembatan. Dengan demikian, Pancasila dapat dipandang sebagai jembatan agama.
- c) Bersikap Toleran dan Saling Menghormati, Dalam masyarakat yang beragam, kita harus saling menghormati dan menghargai serta mampu mengatasi perbedaan, dengan memahami bahwa ajaran agama mendorong kebaikan, kedamaian, dan

kebaikan. Ini berarti kita mengakui bahwa setiap agama berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

- d) Beragama dalam Kerangka Kemanusiaan, Menerapkan Pancasila dalam beragama juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Seperti yang tercermin di sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” hal itu mengingatkan kita bahwa pada dasarnya ajaran agama mengajarkan empati, keadilan, dan perhatian terhadap sesama. Dengan demikian, menerapkan Pancasila dalam beragama berarti memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ke dalam praktik agama.

Dulunya merupakan jajahan bangsa lain, Republik Indonesia tumbuh dan berkembang melalui konflik yang penuh kekerasan. Suku, budaya, ras, agama, dan kekompakan kelompok tidak diragukan lagi berkontribusi pada kemerdekaan negara ini pada akhirnya. Tentu saja, dalam konteks ini, Pancasila—ideologi dan sikap hidup bangsa—harus adil dan inklusif terhadap semua aspek bangsa ini. Artikel ini berfungsi sebagai katalis untuk introspeksi di antara semua aspek masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan inisiatif untuk memperkuat Pancasila sebagai identitas dan pemersatu nasional. Realitas yang menggambarkan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup berbangsa masih banyak berpusat pada tataran teoritis dan konseptual, dalam arti belum menyatu dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Munculnya paham radikalisme yang sangat bertentangan dengan hakikat Pancasila merupakan salah satu tandanya.

Indonesia dulunya disebut sebagai negara yang sukses oleh Nurkholis Madjid. Pernyataan ini tentu saja bukan tanpa dasar, melainkan merupakan produk dari keadaan nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1945. Karena Indonesia merupakan rumah bagi ratusan suku bangsa dan negara yang berbeda, Indonesia dianggap mampu menumbuhkan solidaritas budaya. Beberapa perspektif masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh isu-isu internasional terkini, seperti radikalisme, yang terbukti membahayakan kedaulatan nasional.

Realitas pendidikan di Indonesia yang kita saksikan dan kita ketahui saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, menjadi salah satu faktor yang turut mendorong perubahan global yang semakin pesat. Ketidakmanusiaan dalam dunia pendidikan terlihat dari kekerasan guru terhadap siswa, kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan kebutuhan nyata di kelas, dan berbagai masalah lain yang menimpa dunia pendidikan Indonesia. Agar proses pendidikan di sekolah benar-benar kembali kepada tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofisnya, maka masyarakat pendidikan harus mengantisipasi hal tersebut. Selain mengajarkan dan memperkuat kemampuan kognitif siswa, para pendidik di seluruh dunia harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan karakter positif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar mereka dapat mengamalkan Pancasila di tempat mereka berada. Hal inilah yang menjadi tujuan para guru di sekolah, para dosen di perguruan tinggi, dan tenaga kependidikan di lembaga lain yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan.

Pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan penggunaan metode apresiasi sebagai sarana efektif penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan dua strategi yang dapat digunakan oleh para pendidik, seperti pendidik di sekolah dasar atau menengah, untuk membantu siswa belajar menyerap dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Para guru juga seyogyanya menciptakan lingkungan belajar yang adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa di kelas. Oleh karena itu, para pengajar akan mampu mendidik siswanya dengan baik dan berkarakter jika kita kembali kepada Pancasila sebagai konsep negara dan landasan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan nasional yang berlandaskan pada cita-cita luhur Pancasila juga dapat dibantu oleh unsur-unsur lain yang dikaji dari sila-sila Pancasila.

Hidup di negara dengan keragaman budaya dan agama merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Keberagaman agama dan budaya selalu dijunjung tinggi oleh negara (pluralisme). Meskipun bersikap toleran dan terlibat dalam wacana lintas budaya dan antar agama tidak pernah lepas dari kesulitan, namun miskomunikasi sering kali berujung pada perselisihan (Lukman Ismail et al., 2024). Salah satu konflik yang sering terjadi saat ini adalah konflik agama. Konflik agama merupakan ketegangan atau pertentangan yang timbul antara individu, kelompok, atau masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan agama atau penafsiran terhadap ajaran agama. Konflik tersebut dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan budaya, dan sering kali memunculkan ketegangan dan pertentangan yang mendalam. Sumber konflik dapat beragam, termasuk perbedaan keyakinan, praktik ibadah, atau penafsiran terhadap nilai-nilai agama. Ibadah sendiri merupakan praktik ritual dalam menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yang tentunya membutuhkan rasa aman (Ismail et al., 2021). Menyelesaikan konflik agama sering kali membutuhkan upaya untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai rekonsiliasi.

Sejauh konflik dibenarkan oleh alasan agama, orang yang bersangkutan sebenarnya tidak setia pada iman dan agamanya. Agama dipakai, nama Tuhan dihina oleh egoisme dan kesombongan kolektif. Kejadian semacam itu sebenarnya tidak lagi atas nama agama, lantaran agama pada hakikatnya adalah sikap pemujaan, penyerahan diri, dan kerendahan hati kepada yang transenden (Yunus, 2014). Agama dalam kehidupan yang semakin modern berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama sebagai jaringan sosial telah melahirkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai sebagai pegangan utama bagi kemanusiaan yang beradab, yang bertujuan untuk menuju pada kondisi yang lebih dinamis. Sebab, zaman semakin berganti, gaya hidup semakin kompleks, yang telah menggerus nilai-nilai kemanusiaan (Najib, 2005).

Tidak hanya di Bitung Sulawesi Utara, konflik antar agama juga pernah terjadi di Poso Sulawesi Tengah, konflik ini sama halnya dengan konflik di Bitung Sulawesi Utara, konflik yang bermula dari dua kelompok individu yang berbeda agama, karena perbedaan agama tersebut, masyarakat kemudian menggiring konflik ini ke masalah agama. Konflik Poso terjadi sejak tanggal 25 Desember 1998 sampai dengan 20 Desember 2001, kejadian ini berawal dari permasalahan penduduk asli Poso yang merasa terpinggirkan dengan kehadiran para pendatang dari luar Poso (Alganih, 2016). Berdasarkan kedua contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel politik, sosial-ekonomi, dan identitas,

serta konflik dan bahkan kesulitan sumber daya, lebih mungkin menyebabkan konflik antar agama daripada konflik agama semata. Meningkatnya konflik agama dapat menyebabkan kerusuhan, keresahan masyarakat, dan kemungkinan perang besar. Meningkatnya konflik antar komunitas agama dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat tumbuhnya perdamaian di antara para konstituennya. Untuk menghentikan pertikaian agar tidak semakin parah, sangat penting untuk mempromosikan komunikasi antar agama, toleransi, dan peningkatan pemahaman.

Karena toleransi beragama sangat penting, setiap orang harus dapat menerima bahwa perbedaan pada orang lain atau komunitas tidak perlu menjadi penyebab kekhawatiran. Perbedaan orang lain harus dilihat sebagai kontribusi terhadap kekayaan budaya, oleh karena itu perbedaan dapat bermanfaat jika dipertimbangkan dan dipahami dengan saksama (Dewi et al., 2021). Pentingnya pendidikan multikultural berada di dalam masyarakat dan harus terus dikembangkan dari usia dini hingga di tempat kerja. Sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari hal ini, sehingga menimbulkan konflik antar kelompok. Para guru berusaha memberikan pendidikan karakter berbasis multikultural sebagai upaya pencegahan sejak awal. Sistem pendidikan dapat menjadi metode belajar global yang diterapkan melalui teladan sikap, penekanan pada disiplin, kebiasaan, menciptakan suasana kondusif, serta integrasi dan internalisasi (Audina & Biari, 2024).

Pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam membantu membangun masyarakat yang beragam dan demokratis dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerja sama antarbudaya (Muzaki & Tafsir, 2018). Dengan pendidikan multikultural, individu belajar menjadi warga negara yang inklusif, menghargai keragaman budaya, dan berinteraksi secara harmonis dengan orang lain tanpa diskriminasi (Amin, 2018). Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih terbuka, adil, dan demokratis.

Perlakuan Nabi Muhammad saw. terhadap non-muslim dilakukan dengan tanpa diskriminasi. Beliau menunjukkan rasa hormat dan adil kepada Yahudi dan Nasrani, termasuk anjuran untuk menjamu tamu dengan baik meskipun mereka non-muslim. Beliau selalu memastikan bahwa hak-hak non-muslim dihormati dan dilindungi oleh masyarakat Islam. Salah satu contoh terkenal adalah Perjanjian dengan Biara St. Catherine di Sinai, yang menjamin hak-hak dan perlindungan bagi komunitas Kristen di bawah pemerintahan Islam (Morrow, 2013). Perjanjian-perjanjian ini menekankan perlindungan hak-hak Kristen, termasuk kebebasan beragama, perlindungan tempat ibadah, dan hak untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan.

## Kesimpulan

Pancasila merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Yang mana posisi atau kedudukannya mempunyai peran besar terhadap rakyat Indonesia yang beragam. Karena keragaman suku, adat, budaya, dan agama di situlah Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa agar tetap terjalin rukun, damai, tenteram, dan nyaman baik dalam masyarakat agamis maupun multicultural. Hendaknya dalam masyarakat multikultural



maupun agamis saling toleransi, saling menghormati, menghargai setiap perbedaan yang mengiringi. Baik dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila maupun ada ayat-ayat yang menguatkannya baik dari al-Quran maupun hadits-hadits rosul. Berbagai cara pun dapat dilakukan agar tetap terjalin rasa persaudaraan, kerukunan, kenyamanan untuk mencapai kesatuan, seperti dengan Pendidikan multicultural yang sudah dimulai sejak dini maupun dengan cara yang lain. Dengan demikian adanya usaha kesadaran dari individu masing-masing akan membuat tercapainya kesatuan, persatuan dalam suatu negara.

## Daftar Pustaka

- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(10), 166–174. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=konflik+poso&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1708927836713&u=%23p%3DrmKo5ZZy83gJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=konflik+poso&btnG=#d=gs_qabs&t=1708927836713&u=%23p%3DrmKo5ZZy83gJ)
- Amin, M. (2018). Pendidikan Multikultural. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 09(1), 24–34. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020/3342>
- Asmuri, A. (2017). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Telaah Terhadap Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Agama Islam). *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i1.2530>
- Audina, D., & Biari, H. (2024). Pendidikan multikultural dalam sirah nabawiyah : pembelajaran untuk masyarakat majemuk Pendahuluan. 2(6), 834–845.
- Dewi, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Penanaman Sikap Toleransi Antar Umat Beragama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8060–8064.
- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*, 26(1), 117. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>
- Hutahaean, H. (2020). Tantangan Teologi Agama-agama: Suatu Diskursus Model. *Kurios*, 6(2), 255. <https://doi.org/10.30995/kur.v6i2.136>
- Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1), 129–154. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/573%0Ahttp://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>
- Iryani, I., & Suriatie, M. (2021). Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sinema Edukasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Multikultural Siswa Kelas XI Di SMA Isen Mulang Palangka Raya. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 1(2), 31–36. <https://doi.org/10.37304/pandohop.v1i2.3469>
- Ismail, L., Kaharuddin, K., & Fajrini S, N. I. (2021). Resolusi Konflik Agama Dalam Integrasi Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 77–82. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i2.16>
- Khairuddin, A. (2018). Epistemologi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Ijtimaiyah*,

2(1), 1–20.

- Lukman Ismail, Yulfa Lumbaa, Novia Damayanti, Fauziah Ainun Jariah, Dahniar Nur, & Fhiratun Afiat Muizunzilah. (2024). Meretas Jalan Damai Pandangan Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Agama. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 83–90. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.187>
- Morrow, J. A. (2013). *The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World*. Angelico Press, Sophia Perennis. <https://books.google.co.id/books?id=oPsungEACAAJ>
- Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islamic Worldview. 6(1).
- Najib, M. (2005). Agama dan Resolusi Konflik dalam Pilkada. *Unisia*, 28(58), 415–424. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art7>
- Nasrullah, A., Apriyanto, A., Fajrina, R. M., Santoso, R. Y., Irianto, I., Rosit, M., Hazmi, R. M., Jumiono, A., Sepriano, S., Gustiani, W., & others. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Qn8oEQAAQBAJ>
- Riswadi. (2023). *Berpancasila dan Beragama dengan Benar*. Kemenag. <https://kemenag.go.id/kolom/berpancasila-dan-beragama-dengan-benar-tES9o#:~:text=Berpancasila dalam konteks beragama berarti menghilangkan sekat-sekat pemisah>
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. PT Balai Pustaka (Persero). <https://books.google.co.id/books?id=7RB9DQAAQBAJ>
- Saifuddin, L. H. (2019). MODERASI BERAGAMA. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. <https://books.google.co.id/books?id=e-iizQEACAAJ>
- Sugiarto, R. T. (2021). *Ensiklopedi Pancasila: Sejarah Lahirnya Pancasila dan UUD 1945*. Hikam Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=TT1IEAAAQBAJ>
- Suhelmi, A. (2002). *Polemik negara Islam: Soekarno versus Natsir*. Teraju. <https://books.google.co.id/books?id=xcRwAAAAMAAJ>
- Thaba, A. A. (1996). *Islam dan negara dalam politik Orde Baru*. Gema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=8rkxAAAAMAAJ>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya (Religious Conflicts in Indonesia Problems and Solutions to Solve them). *Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217–228.